

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
INTISARI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hukum dalam Kebijakan Pembangunan.....	13
a. Hukum Sebagai Kebijakan Publik.....	13
b. Kebijakan Pembangunan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan.....	17
B. Teori-Teori Dalam Hukum Pembangunan.....	21
1. Teori Politik Hukum.....	21
2. Teori Hukum Pembangunan.....	25
3. Pembandingan Teori Hukum Pembangunan.....	30
C. Pentingnya EoDB Dalam Pembangunan Nasional.....	37
1. Pengertian <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB).....	40
2. Manfaat <i>Ease of Doing Bussiness</i> (EoDB).....	41
3. Indikator <i>Ease of Doing Bussiness</i> (EoDB).....	43
4. Fungsi <i>Ease of Doing Bussiness</i> (EoDB).....	45

5.	Capaian <i>Ease of Doing Bussiness</i> (EoDB) Indonesia.....	46
6.	Tantangan <i>Ease of Doing Bussiness</i> (EoDB) di Indonesia.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		58
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	58
B.	Sifat Penelitian.....	60
C.	Pendekatan Penelitian.....	60
D.	Jenis Data dan Cara Memperoleh Data.....	61
E.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	65
F.	Analisis Data.....	66
G.	Teknik Pengambilan Sampel.....	67
H.	Jalannya Penelitian.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		69
A.	Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Mendukung <i>Ease of Doing Business</i> (Eodb) Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Pembangunan.....	69
1.	Pola Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	69
2.	Kebijakan yang Bersifat Berkaitan Langsung Dengan Indikator <i>Ease of Doing Bussiness</i> (EoDB).....	80
3.	Kebijakan yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	107
B.	Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Terkait <i>Ease of Doing Business</i> (EODB) Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	117
BAB V PENUTUP.....		123
A.	KESIMPULAN.....	123
B.	SARAN.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....		127

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Terkait Indeks Starting Business Berdasarkan Tahun	hal 88
Tabel 4.2 Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Terkait Indeks Getting Credit Berdasarkan Tahun	hal 97
Tabel 4.3 Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Terkait indeks resoving insolvency Berdasarkan Tahun	hal 104
Tabel 4.4. Daftar komposisi peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi pada 12 (dua) belas kelompok kerja	hal 111
Tabel 4.5. Daftar perincian hasil rekomendasi BPHN	hal 112